



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANGGARAN PEMILU 2024 DI TENGAH ISU PENUNDAAN PEMILU

Aryo Wasisto
Peneliti Pertama
aryo.wasisto@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pembahasan Pemilu 2024 berada gelombang isu penundaan pemilu. Meskipun demikian, Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan nasional yang harus dilaksanakan. Jadwal pemungutan suara ditetapkan pada 14 Februari 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI), dan Kementerian Dalam Negeri. Komisioner penyelenggara pemilu pun sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi KPU dan DPR RI segera merencanakan pembahasan anggaran pemilu.

Pembahasan anggaran sangat ditentukan dengan siapnya Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu. PKPU menjadi basis hukum untuk besaran anggaran yang akan dikeluarkan. Sedangkan pada saat ini, isu penyelenggaraan pemilu diapit oleh isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua isu tersebut memotivasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk memperbincangkan kepastian Pemilu 2024. Isu tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa anggaran pemilu yang diajukan KPU terlalu besar dan terdapat 110 juta warga negara dari *big data* yang memperbincangkan persoalan penundaan pemilu.

Keputusan terkait tahapan dan anggaran Pemilu 2024 menjadi salah satu cara untuk menepis wacana dan manuver penundaan pemilu yang terus bergulir. Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 juga semestinya sudah dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pembahasan yang berlarut-larut akan memengaruhi kesiapan peserta pemilu dalam mengambil langkah karena isu penundaan pemilu yang masih bergulir.

Di sisi lain, pembahasan mengenai anggaran telah melewati siklus pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Jadi, hal ini membutuhkan perhatian yang ekstra serius dari DPR RI, terutama di Badan Anggaran dan Komisi II DPR RI. Apalagi ada dua tahapan krusial yang waktunya begitu dekat, yaitu: soal pendaftaran partai politik dan peserta pemilu, serta soal penentuan daerah pemilihan.

Untuk memastikan itu semua, Komisi II DPR RI sudah membuat agenda untuk pembahasan anggaran dan tahapan pada 11 April 2022, satu hari sebelum habis masa jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu yang lama. Pembahasan nantinya dilanjutkan dengan Komisioner Bawaslu dan KPU yang baru. Diharapkan

transisi kepemimpinan berjalan lancar. Hal terpenting dalam agenda tersebut adalah fungsi DPR RI dalam melakukan penyisiran dan penyesuaian kembali biaya dalam setiap tahapan. Apalagi, disadari bahwa ada peningkatan biaya pemilu yang sebagian besar untuk kebutuhan anggaran bagi tenaga atau petugas ad hoc.

Atensi DPR

DPR RI berperan penting dalam memberi pertimbangan kebutuhan anggaran Pemilu 2024. Efisiensi dan penghematan anggaran menjadi topik penting yang akan dibahas pada 11 April 2022 bersama Komisioner KPU RI. Dalam menjalankan peran tersebut, DPR RI juga dapat memberi usulan untuk memangkas pos-pos anggaran yang kurang signifikan seperti pembangunan fisik gedung yang memungkinkan biaya pemilu bisa ditekan. Hal ini dapat disolusikan dengan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. DPR RI juga mendesak KPU RI untuk mempertimbangkan anggaran kebutuhan *ad hoc* yang mencapai 50% dari seluruh anggaran. Hal ini tentunya dapat dibahas dengan Menteri Keuangan RI. Penetapan anggaran dan PKPU untuk Pemilu 2024 menunjukkan peran DPR RI dalam menjalankan konstitusi dan sekaligus mereduksi wacana atau isu mengenai penundaan pemilu.

Sumber

Kompas, 14 Maret dan 4 April 2022



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Ari Muliarta Ginting
Eka Budianti
Nidya Waras S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.